

**MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DOMAIN SOSIO-KULTURAL:  
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN OLEH BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELU**

**Dorcas Langgar**  
**Staf Pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Universitas Nusa Cendana**  
e-mail: [dorcaslanggar@staf.undana.ac.id](mailto:dorcaslanggar@staf.undana.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil evaluasi program dari keempat komponen pada PPWK yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu. Penelitian melalui pendekatan kualitatif, metode evaluasi program stufflebeam CIPP, Langkah penelitian membandingkan kriteria ideal sub indikator komponen CIPP dengan data riil lapangan dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dan peneliti memberikan bobot ketercapaian setiap sub indikator, berdasarkan teknik kriteria kualitatif dengan pembobotan diperoleh nilai dan predikat setiap komponen pada PPWK. Hasil Penelitian 1) Kegiatan PPWK Badan Kesbangpol Kabupaten Belu berjalan fungsional sesuai standar Permendagri 71/2012 atas dasar SK Bupati Belu dikoordinir Bidang I Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, menyasar masyarakat kecamatan perbatasan. Nilai 3.4, sangat efektif. 2) Nilai input 3.0, efektif. Penurunan anggaran. Sarpras memadai. Metode ceramah, diskusi. Evaluasi melalui laporan kegiatan dan pimpinan. Nilai proses 3.31, efektif. Tepat waktu, adanya koordinasi dengan kecamatan dan pemetaan wilayah, hambatan: anggaran, SDM, kepustakaan wasbang. 3) Kualitas cukup tercapai, Kuantitatif terlaksana sesuai agenda. Masyarakat berharap menjangkau desa. Tidak ada survey kepuasan. Nilai 3.36, efektif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Badan Kesbangpol dan Wawasan Kebangsaan

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami berbagai dinamika perwujudannya dalam kegiatan pembelajaran baik itu di lingkungan non-formal, formal maupun informal sejak Negara Bangsa Indonesia merdeka.

Ilmu kewarganegaraan (*civics*) yang merupakan cikal bakal pendidikan kewarganegaraan bahkan sudah berkembang sejak zaman penjajahan Kolonial Hindia Belanda meskipun objek kajiannya masih berbeda-beda antara ahli. Sebagaimana yang termuat dalam literature-literatur seperti buku yang ditulis P. Tromps dengan judul *Indesche Burgerschapkunde* membicarakan esensi-esensi akan masalah bumiputra; pengaruh barat pada bidang hukum kebudayaan serta sosial-ekonomi dan ketatanegaraan..., serta buku yang berjudul *Recht en Plicht (Indesche Burgerschapkunde Voor Ledeneen)* tulisan J. B. Vortman, dimana membahas masyarakat sejak lahir hingga dewasa, pernikahan dan keluarga, hak agraris atas tanah, masalah perundang-undangan dan seterusnya (Lobo dan Bessie, 2019:25-26).

Sejak 1957 dikenal istilah Kewarganegaraan, kemudian ditransformasi menjadi *Civics* sejak 1961 (Winarno, 2014: 15), tahapan selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan Negara atau bisa dikatakan sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (kurikuler) diperkenalkan pada kurikulum 1968 sebagai akibat dalam menyiapkan *Good Citizenship*. Kajian Pendidikan Kewarganegaraan kurikuler saat itu (1968) memuat ilmu bumi, sejarah dan *civics*. Pendidikan kewarganegaraan menekankan pendekatan

andragogi yang berorientasi pada praktek kewarganegaraan serta merupakan perluasan dari mata pelajaran *civics* (Wahab dan Sapriya, 2011: 150).

Pendidikan kewarganegaraan disemai dari tradisi *Citizenship Education* dan *Civic Education* yang mempunyai tujuan programnya identik dengan tujuan nasional dari masing-masing negara (Wahab dan Sapriya, 2011: 99).

Tujuan negara Indonesia sebagaimana terurai di dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dilihat secara garis besar tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah menjadikan warga negara yang baik, yang memiliki inteliensi kewarganegaraan (emosional, sosial, spiritual, intelektual); memiliki tanggung jawab kewarganegaraan; dan partisipasi kewarganegaraan dalam menumbuhkan cinta tanah air dan berbangsa (Wahab dan Sapriya, 2011: 99). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan.

Demikian, maka pendidikan kewarganegaraan dalam kajian kurikuler di satuan pendidikan/lingkungan formal memiliki landasan yuridis-formal yang kuat dalam pelaksanaannya yakni UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional dan landasan kurikuler yakni Permendikbud tentang KI dan KD yang berlaku sesuai kurikulum saat ini yakni kurikulum 2013 revisi.

Ironis dan menjadi pertanyaan bersama seperti yang diutarakan mahasiswa saat perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Semester IV Program Studi PPKn FKIP Undana dan kelas kolaborasi bersama mahasiswa semester IIb Program Studi Sosiologi FISIP Undana Tahun Akademik 2019/2020 diruang PPKn 2, dilontarkan pertanyaan oleh seorang mahasiswa Sosiologi “*Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijalankan pada masyarakat yang tidak berkesempatan mengenyam persekolahan/kuliah?*” Putus sekolah, tidak sekolah. Dalam diskusi yang berlangsung yang di kelas diikuti juga penulis sebagai peserta, pada akhirnya diambil kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan di luar satuan pendidikan/sederajat didapatkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, penataran maupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya, jika subjek peserta pendidikan kewarganegaraan merupakan peserta pendidikan non-formal maka ia diberikan pendidikan kewarganegaraan secara terpolo melalui kelompok pembelajaran non-formal (Paket A, B, C). Kajian penelitian akan pendidikan kewarganegaraan di luar persekolahan merupakan ranah baru yang strategis dalam penguatan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yang merupakan suatu urgensi dewasa ini, hasil diskusi tersebut diatas dapat dibuktikan dengan sebuah penelitian ilmiah yakni bagaimana pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di luar persekolahan agar diperoleh kepustakaan akan pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas lagi, sebelum itu penulis mengajak kita memposisikan teori-teori domain pendidikan kewarganegaraan, agar kita dapat memposisikan arah dan kawasan pendidikan kewarganegaraan bergerak.

Beberapa penulis terdahulu meletakkan dasar mengenai terdapat tiga domain dari pendidikan kewarganegaraan pada bidang kurikuler, akademik dan sosio-kultural. Pendidikan kewarganegaraan dalam aspek sosio-kultural bergerak dalam pemberdayaan masyarakat tandas Winataputra dan Budimansyah dalam Nurdin, (2016: 21). Senada Penelitian yang dilakukan Aulia dan Arpannudin (2019) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di luar pendidikan formal.

Pada tataran awal berdasarkan hasil pengamatan, penulis mendapatkan gambaran, pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural mendapat tempat yang sedikit dalam kegiatan pemantauan, maupun kegiatan penelitian dan pengembangan pada lingkup pendidikan kewarganegaraan di NTT maupun di Indonesia pada umumnya, secara umum kegiatan pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural bergerak secara sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi bahkan ketidaksadaran bahwa apa yang dilakukan melalui berbagai kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural. (Observasi, September 2021).

Perlu adanya penelitian komprehensif mengenai pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural guna mengetahui pelaksanaan dan evaluasi akan program tersebut, sehingga dicapai informasi, fakta dan data-data yang mendukung dalam penguatan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan kedepannya atau dengan kata lain yakni menyelaraskan program penguatan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural dengan pendidikan kewarganegaraan pada domain kurikuler yang dijalankan pada satuan pendidikan maupun pendidikan kewarganegaraan domain akademik yang dijalankan Program Studi PPKn FKIP Undana maupun

Program Studi PPKn lainnya di NTT dan Indonesia yang merupakan satu kesatuan, sehingga tercapainya pendidikan kewarganegaraan sepanjang hayat atau pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan, dalam mewujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan, menjadikan manusia Indonesia sebagai *good, smart, responsibility and participation citizenship*. (Bani, 2021)

Penulis merupakan bagian dari komunitas pendidikan kewarganegaraan merasa perlu dan wajib untuk meneliti pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural yang dijalankan guna mendapat informasi sejauh mana pelaksanaan dan evaluasi pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural atau dalam istilah kepustakaan lainnya dinamakan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan/PKn Kemasyarakatan dijalankan di Nusa Tenggara Timur yang masih sangat terbatas informasi dan kepustakaan dalam kalangan komunitas pendidikan kewarganegaraan, penelitian yang dilakukan mengenai pola kehidupan masyarakat kebudayaan dan sosial Nusa Tenggara Timur masih berfokus kepada penggalian nilai-nilai Pancasila maupun kewarganegaraan dalam adat/budaya/kebiasaan/kepercayaan yang berkembang ditengah masyarakat, dapat dikatakan hal ini merupakan bagian dari misi pendidikan kewarganegaraan domain akademik secara garis besar, penggalian akan kegiatan kemasyarakatan dan budaya yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung akan pemberdayaan masyarakat lokal setempat, yang merupakan misi pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural nampak belum dilakukan penelitian ataupun sangat kurang, karena keterbatasan kepustakaan yang membahas atau menunjukkan pembahasan secara khusus pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural di Nusa Tenggara Timur. (Bani, 2021)

Penulis menelaah mass media yang memberitakan pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural, hasil telaah tersebut, penulis mendapatkan kegiatan yang relevan dengan konsepsi pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural dan telah berjalan ditengah masyarakat dengan pertimbangan pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian yang multifacet maka didapatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural yang sudah dijalankan yakni PPWK yang telah dilaksanakan oleh Bakesbangpol Belu seperti pada website resmi. (Bani, 2021)

Wawasan Kebangsaan yang merupakan kajian dari pendidikan kewarganegaraan, baik dalam domain sosio-kultural, substantif akademik, maupun kurikuler. Pada misi sosio-kultural atau kemasyarakatan pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dijalankan secara khusus sesuai amanat peraturan pelaksana yakni Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang PWK.

Pengembangan suatu program pendidikan secara efektif dan dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut, di samping kajian evaluatif pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai domain, penulis yang merupakan bagian dari komunitas pendidikan kewarganegaraan mengemukakan perlu dikaji keefektifitasan pelaksanaan pendidikan penguatan wawasan kebangsaan di masyarakat yang telah dilaksanakan pemerintah daerah atau dengan kata lain perlunya kajian efektivitas secara ilmiah akan pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural (dalam hal ini PPWK) yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Belu melalui Bakesbangpol, guna mengetahui dan menjadi masukan akan keselarasan tujuan dan program wawasan kebangsaan serta mendapat informasi, fakta dan data-data dari kajian evaluatif pendidikan kewarganegaraan di luar lembaga satuan pendidikan formal jenjang dasar-menengah dan kajian akademik atau dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural/kemasyarakatan, senada dengan itu Sugiyono (2018:14) mengemukakan efektivitas suatu program yang dievaluasi dari pihak luar (penulis yang bukan organik instansi yang menjadi fokus dan lokus penelitian) memiliki objektivitas yang lebih tinggi maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “Misi Pendidikan Kewarganegaraan Domain Sosio-Kultural: Efektivitas Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu”.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada wilayah hukum Badan Kesbangpol Kabupaten Belu, Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Belu bertempat di Jalan El Tari No. 01 Kompleks Kantor Bupati Belu, Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT.

## **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian pada peneliti dilakukan berdasarkan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling* maka didapatkan informan sebagai berikut

1. Kepala/Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Belu;
2. Kabid I Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Belu;
3. Kasubid Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Kabupaten Belu/Fungsional Analis Kebijakan Subbid I;
4. Staf Fungsional/Analisis pada Badan Kesbangpol Kabupaten Belu
5. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan/Perencanaan Bakesbangpol Belu
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Kabupaten Belu;
7. Masyarakat penerima layanan PPWK oleh Bakesbangpol Kabupaten Belu.

## **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian evaluasi program model Stufflebeam CIPP atau *Context, Input, Process, and Product* akan pelaksanaan program PPWK oleh Bakesbangpol Kabupaten Belu yang merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural. Metode CIPP membantu penulis dalam meneliti secara komprehensif dari kriteria konteks, masukan, proses dan produk dimana mempermudah penetapan kriteria yang selanjutnya disebut komponen. Setelah kriteria didapat maka membandingkan kriteria dengan ketercapaian sesuai informasi yang disampaikan informan, diperlukan lagi dengan kriteria yang memiliki indikator atau sub indikator yang dibobot sehingga dapat menentukan secara pasti efektivitas berada di level sangat efektif, efektif, cukup efektif dan kurang efektif dalam pelaksanaan program tersebut. Kriteria dipakai sebagai pembanding dalam pengukuran evaluasi. (Arikunto dan Jabar, 2018:30).penulis menggunakan kriteria kualitatif dengan pertimbangan pembobotan yakni pada setiap komponen konteks, input, proses dan produk yang mempunyai indikator, setiap indikator diberi nilai dengan bobot yang berbeda. (Bani, 2021)

## **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini merupakan informan yang merupakan subjek penelitian, dilakukan proses OWD dalam mendapatkan data, informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, subjek penelitian merupakan pelaksana program pendidikan penguatan wawasan kebangsaan dan masyarakat yang dikenai secara langsung dari program yang dijalankan.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan (Sugiyono, 2018:271). Selanjutnya disingkat OWD.

Observasi pada aktivitas kegiatan pelayanan pegawai terhadap masyarakat di kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Belu maupun perilaku masyarakat terhadap identitas negara tetangga, sarana prasarana pada Bakesbangpol Kabupaten Belu.

Wawancara dilakukan pada informan yakni Kepala/Sekretaris, Kabid, Staf pada Bakesbangpol Kabupaten Belu pada komponen konteks, input, proses dan output sesuai dengan instrumen penelitian yang dibuat.

Dokumentasi dengan menelaah mass media, kelengkapan materi 4 konsensus kebangsaan pada pendidikan wawasan kebangsaan, hasil evaluasi internal pelaksanaan pendidikan penguatan wawasan kebangsaan, pedoman pendidikan penguatan wawasan kebangsaan, dokumen kemitraan antara instansi, dan dokumentasi lainnya.

Pada setiap pengumpulan data digunakan triangulasi agar mengetahui sejauh mana pemahaman penelitian dapat dipahami secara holistik dan menguji kredibilitas data dari hasil OWD (Sugiyono, 2018: 290).

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification* (Sugiyono, 2018:336). Pada penelitian ini untuk mengukur efektivitas suatu program diuraikan langkah-langkah analisis yakni

1. Hasil penelitian dianalisis dengan membandingkan kriteria yang ada dengan pendapat informan(wawancara) maupun hasil observasi dan dokumentasi akan ketercapaian rencana, pelaksanaan, dan produk dari program pendidikan penguatan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Belu, hal ini sebagai langkah analisis hasil pertama;
2. Kedua, penulis memberikan disposisi bobot ketercapaian akan indikator berdasarkan rentangan ketercapaian yang disiapkan penulis pada instrumen soal yang ditanyakan kepada informan dan berdasarkan hasil analisis lanjutan dengan teknik kriteria kualitatif pertimbangan pembobotan didapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

### **Uji Keabsahan Data**

Penulis menguji kredibilitas data melalui peningkatan ketekunan dan triangulasi sumber data, teknik data dan waktu pada table resume hasil penelitian dan *member check*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Lembaga Penanggungjawab Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah**

Bagian profil, penulis mendeskripsikan akan efektivitas komponen konteks dan garis-garis besar dari profil Bakesbangpol sebagai lembaga penanggung penanggungjawab pendidikan penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

1. Sub indikator 1 Dasar Hukum, Sosiologis dan Filosofis Program Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan dijalankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu.

Dasar pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fokusnya pada tugas pemerintahan umum. Permendagri 71/2012 belum muncul dalam pembicaraan atau tidak jelaskan informan, dikonfirmasikan kepada informan, kegiatan masih berpatokan secara umum pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014, akan tetapi dalam menelaah dokumen-dokumen arsip yang ada, penulis mendapat adanya Permendagri 71/2012 sebagai dasar hukum dalam pertimbangan surat keputusan Bupati dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dasar filosofis dan sosiologis dimunculkan dalam pertimbangan pembentukan SK Bupati tentang kepanitian PWK dengan demikian Cukup memahami dasar pelaksanaan PPWK.

Sejarah Badan Kesbangpol pada masa Orde Baru bernama Kantor Sospol (Sosial Politik) setelah direvisinya Undang-Undang Pemerintahan Daerah 1999, nomenklatur berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, akibat bergabungnya Kantor Sospol dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Belu, dan di tahun 2006 berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, nomenklatur ini berlanjut hingga adanya pengalihan fungsi Perlindungan Masyarakat kepada Sat Pol PP Kabupaten Belu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 maka nomenklatur berubah dan diperbaharui lagi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu, di tahun 2019 diperbaharui lagi nomenklatur sesuai Permendagri tentang Instansi Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik dan dipertegas Perda Kabupaten Belu No. 10 2019, nomenklurnya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu berlaku hingga saat ini, yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris yang memimpin Sekretariat dan membawahi 3 Kasubag, dan 4 Bidang dengan masing-masing bidang membawahi 2 Subbidang serta Jabatan Fungsional. Skor 3.5 dari 4.0.

2. Sub indikator 2 Struktur Organisasi: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan/PPWK

Sejak 2016-2022 tidak ada Pusat Pendidikan Wasbang sesuai amanat Permendagri 71/2012 akan tetapi pelaksanaan Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan sudah dijalankan berkesinambungan oleh Bakesbangpol yang dikoordinasikan oleh Bidang I, Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Struktur organisasi Bakesbangpol terdapat sebuah bidang dan subbidang yang mengurus secara khusus wasbang yakni Bidang I Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Skor 2.5 dari 4.0.

3. Sub indikator 3 Keselarasan Program dengan Visi Misi Kelembagaan

Visi Misi Bakesbangpol merujuk pada Visi Misi Bupati Belu, dan visi misi tersebut menjadi acuan dalam pembentukan RPJMD Kabupaten Belu yang dimana terdapat program PPWK

sebagai indikator program utama bidang I Badan Kesbangpol Kabupaten Belu, dengan demikian visi, misi kelembagaan selaras dengan program, Pendidikan Penguatan wawasan kebangsaan. Skor yang diperoleh 4.0 dari 4.0

4. Sub indikator 4 Tindak Lanjut Program dalam RPJMD Kabupaten Belu

Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjadi indikator bidang I Bakesbangpol dalam RPJMD 2016-2021 dan 2021-2026. Skor yang diperoleh 4.0 dari 4.0.

5. Sub indikator 5 Pertimbangan tujuan Program dengan Realita Lapangan

Sudah menyentuh masyarakat perbatasan pada level kecamatan tetapi kebutuhan akan sosialisasi di level desa/kelurahan tidak dapat terpenuhi keterbatasan anggaran, Masih ditemukan identitas nasional negara Timor Leste berupa bendera dalam rumah warga, mengindikasi belum mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan. Skor yang diperoleh 3.0 dari 4.0.

**Efektivitas Program Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Berdasarkan Permendagri No 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Regulasi yang Terkait serta Upaya Pengembangan Masyarakat**

Pada bagian ini kita mengkaji efektivitas dua komponen yakni, komponen Input dan komponen Proses dalam Pelaksanaan PPWK oleh Bakesbangpol Kabupaten Belu. Sub Indikator 6-10 sebagai komponen Input dan Sub Indikator 11-15 sebagai komponen Proses. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik data pada komponen input dan komponen konteks, hasil dari komponen input dan proses pada setiap sub indikator diberikan skor, berdasarkan proses membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan skor ideal yang terdapat dalam matriks penilaian, maka dari skor yang diperoleh tersebut, dihitung nilai dan predikat efektivitas komponen Input dan proses PPWK oleh Bakesbangpol Kabupaten Belu

Komponen Input, Sub indikator 6-10

1. Sub indikator 6 Ketersedian Pedoman Pelaksanaan Program

Pedoman pelaksanaan kegiatan sebatas SK Bupati sejak kegiatan 2016-2022, Permendagri 71/2012 sebatas dalam dasar hukum SK Bupati tersebut namun penulis belum menemukan bukti fisik Permendagri 71/2012 pada kearsipan Bakesbangpol Kabupaten Belu, tetapi ada slide power point yang menampilkan sosialisasi materi tentang Permendagri 71/2012. Khusus mengenai GNRM, Bela Negara terdapat pedoman. Pelaksanaan program dari segi kedalaman dan keluasan materi sudah sesuai dengan Permendagri 71/2012 termasuk sasaran dan metode. Skor 3.0 dari 4.0.

2. Sub indikator 7 Ketersedian Dana Program

Dana pelaksanaan program penguatan wawasan kebangsaan terdapat dalam DPA tahun berjalan dengan besaran yang berbeda, selama masa pandemic covid-19 terjadi penurunan anggaran PPWK pada Bidang I maupun rencana penganggaran dalam RPJMD 2021-2016 lebih kecil dibandingkan RPJMD 2016-2021. Kegiatan tahun 2016-2019 mendapat dukungan dana yang optimal, kegiatan 2020 dan 2021 berjalan cukup efektif diakibatkan dana yang di *refocusing* penanganan covid-19, kegiatan 2022 masih dalam proses koordinasi lintas kecamatan. Skor 3.0 dari 4.0.

3. Sub indikator 8 Kualitas SDM dari Tingkat Pendidikan dan Latihan

SDM berlatar belakang dominan S1 sebanyak 10 PNS, diikuti 8 PNS berjasah SMA/Sed, 2 PNS Diploma, dan 1 PNS Strata 2. Diklat yang diikuti Intelijen Daerah sebanyak 3 PNS. Diklat Wasbang Dominan pada Prajabatan PNS. Workshop berbagai bidang dilaksanakan melalui zoom. Berdasarkan bidang Ilmu Pemerintahan 3 PNS, Ilmu Ekonomi 2 PNS, Filsafat 1 PNS, Adm Negara 3 PNS, 1 PNS Teknik Informatika, 1 PNS Ilmu Politik, 1 Diploma Manajemen, 1 Diploma APDN dan 8 SMA/SMEA. Meskipun tidak dimasukkan dalam perhitungan karena baru bergabung dengan Bakesbangpol terdapat 3 CPNS berpendidikan SI pada bidang Adm Negara, Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi. Skor 2.5 dari 4.0.

4. Sub indikator 9 Kesiapan Sarana Prasarana, Materi 4 Konsensus Nasional dan Dampak Instruksional maupun Pengiring

Sarana Prasarana baik. Ketepatan materi sudah sesuai Permendagri. Metode masih ceramah dan diskusi, muncul dampak instruksional dan pengiring terbatas berupa, beberapa pertanyaan yang disampaikan dan ditanggapi dalam kegiatan diskusi menunjukkan rasa ingin tahu akan

kebijakan pemerintah dimana menunjukkan sikap partisipasi sebagai warga negara. Skor 3.25 dari 4.0.

##### 5. Sub indikator 10 Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan

Evaluasi melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pimpinan dengan pola periodik dan berjenjang daerah sampai pusat. Belum ada evaluasi internal bagi penerima manfaat kegiatan termasuk tingkat kepuasaan pelayanan kegiatan. Evaluasi ada kesempatan tertentu diadakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan kegiatan tahun 2018 tidak ditemukan dalam arsip. Skor 3.0 dari 4.0.

Komponen Proses, Sub indikator 11-15

##### 1. Sub indikator 11 Rencana Waktu Kegiatan dan Ketepatannya

Pelaksanaan kegiatan cenderung tepat waktu dikarenakan konfirmasi kesediaan dengan pihak kecamatan dan *schedule* kegiatan yang tidak terikat namun diberikan otonomi bagi bidang untuk mengadakan kegiatannya dalam tahun berjalan. Skor 4.0 dari 4.0.

##### 2. Sub indikator 12 Pelaksanaan Program dan pemetaan

Adanya pemetaan wilayah, koordinasi dan sinkronisasi berjalan baik baik internal Bakesbangpol dan Kecamatan penerima layanan PPWK. Langkah kegiatan berjalan baik dalam persiapan kegiatan. Perhatian tersendiri pada kegiatan yang dijalankan tahun 2016-2019 mendapat skor 3.3 dan kegiatan rentangan 2020-2022 mendapat skor 2.5 sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian sehingga diperoleh akumulasi akhir skor 2.9 dari 4.0.

##### 3. Sub indikator 13 Kinerja di Lapangan

Dukungan staf saling kolaborasi antar staf/bidang, kegiatan terjadwal tepat waktu. Pendekatan diskusi mulai dibangun dengan masih adanya ceramah, tidak ada indoktrinasi, dampak instruksional ada dengan tanggapan setelah pemateri menyampaikan materi dan dampak pengiring terbatas sejauh ini sebatas permintaan kegiatan oleh masyarakat untuk terus dijalankan sampai desa. Perlu diperhatikan juga skor kegiatan tahun sebelum pandemic covid-19 yakni 2016-2019 3.3 dan skor 2020-2022 2.5 sehingga akumulasi skor 2.9 dari 4.0.

##### 4. Sub indikator 14 Komposisi waktu sosialisasi

Berdasarkan wawancara dan dokumen yang ditelaah maka komposisi waktu kegiatan sesuai dengan pedoman Permendagri 71/2012, yakni kegiatan selama 1 hari mencakup 4 materi wajib yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI ditambah materi fakultatif yakni muatan lokal namun tidak sering dilaksanakan, muatan lokal hanya sebatas perkenalan organisasi dan tata kelola Bakesbangpol Kabupaten Belu, belum ada kajian seputar sejarah perjuangan daerah dan pahlawan daerah sebagai muatan lokal atau sejenisnya, waktu kegiatan sudah sesuai pedoman yakni 8 jam pembelajaran persatu kali kegiatan sosialisasi di kantor kecamatan atau aula sekolah. Pada masa sebelum pandemic kegiatan menjalankan materi wajib, sehingga skor 3.0 dan saat pandemic materi wajib digabungkan dengan kegiatan GNRM dan Bela Negara dengan sasaran yang kecil dalam pelaksanaan 3M skor 2.5 sehingga akumulasi skor 2.75 dari 4.0.

##### 5. Sub indikator 15 Hambatan

Ditemukan 2 hambatan dari informan dan 1 hambatan dari penulis yakni 2 hambatan yakni anggaran dan SDM, dan yang didapatkan penulis yakni kepustakaan perundang-undangan mengenai wasbang dengan demikian hambatan dalam kisaran 1-5 hambatan maka mendapat Skor 4.0 dari 4.0.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam perihal Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan ini, memberdayakan dalam artian menuju tercapainya semangat kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan atas dasar pengetahuan yang dibangun dari materi-materi 4 konsensus bangsa yang telah diberikan melalui lembaga pemerintah maupun satuan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi program PPWK yang berjalan, penulis menemukan program PPWK sudah mengalami pergeseran pola kerja dari sebelumnya berfokus pada sosialisasi 4 konsensus nasional dari 2016-2020 dan di tahun 2020 sampai 2022 sekarang pola kerja Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan tidak lagi sebatas penyampaian materi tetapi sudah berkolaborasi dengan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang mempunyai Gugus Tugas yang bekerja membangun dari aspek Belu Melayani, Belu Tertib, Belu Bersih, dan Belu Bersatu dengan maksud dan tujuan menyelaraskan pendekatan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat/warga negara dalam memperkuat konteks era Reformasi. Hal baik lainnya ialah muncul

inisiatif kegiatan sosialisasi 4 konsensus nasional/wawasan kebangsaan oleh lembaga infrastruktur politik yakni parpol. Efektivitas Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang ditelaah kegiatan 2016-2022, terjadi beberapa pembabakan berdasarkan nilai dan predikat tingkat efektif menunjukkan pada kegiatan tahun 2016,2017, 2019,2022. Sedangkan kegiatan tahun 2018 tidak ditemukan bukti laporan kegiatan terprogram sehingga tidak dapat diketahui derajat keefektifan kegiatan terprogram, kegiatan undangan non program tahun 2018 berjalan secara efektif berdasarkan hasil telaah mass media. Kegiatan tahun 2020 dan 2021 terpengaruh pandemi *covid-19* sehingga sasaran dan anggaran pelaksanaan Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan menurun dan menyasar dengan jumlah masyarakat yang terbatas serta pemberlakukan protocol kesehatan Covid-19 3M, hal ini memberikan dampak cukup efektif dalam kegiatan pada 2020 dan 2021 yang direncanakan tersebut. Secara umum kegiatan PPWK berjalan efektif dengan beberapa catatan penyempurnaan kegiatan tersebut.

### **Kepuasan Pihak-Pihak Yang Mendapat Layanan dan Ketercapaian dari Program Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu**

Pada bagian ini fokus terdapat pada kepuasan pihak-pihak yang mendapat layanan dan ketercapaian dalam program PPWK pada Bakesbangpol Kabupaten Belu, kajian ini termasuk dalam komponen Produk. Secara khusus pada bagian ini mengkaji indikator produk dengan 5 sub indikator yakni sub indikator 16-20. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan tirangulasi teknik data pada komponen input dan komponen konteks, hasil dari komponen input dan proses pada setiap sub indikator diberikan skor, berdasarkan proses membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan skor ideal yang terdapat dalam matriks penilaian, maka dari skor yang diperoleh tersebut, dihitung nilai dan predikat efektivitas komponen produk pendidikan penguatan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu

#### **1. Sub indikator 16 Kualitas Ketercapaian Tujuan program**

Cukup tercapai, perlu peningkatan gerakan revolusi mental sebagaimana PPWK salah satu dari indikator GNRM sebagai bentuk peningkatan partisipasi/dampak pengiring. Focus PPWK yakni mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, kiranya perlu penelitian mendalam lagi mengenai sub indikator ini dengan nilai-nilai sadar berbangsa dan bernegara. Skor 3.0 dari 4.0

#### **2. Sub indikator 17 Kuantitas Ketercapaian Tujuan program**

Terdapat 15 kegiatan dalam kurung waktu 2016-2019, 2020-2022 dimana 10 kegiatan terprogram dan 5 kegiatan undangan yang berhasil dihimpun penulis data-datanya selama penelitian di lapangan. Kegiatan tersebut terlaksana sesuai yang telah dianggarkan 100% maupun kegiatan non program dari permintaan instansi/parpol. Kegiatan terprogram pada tahun 2018 tidak diketahui karena ketidakadaan dokumen laporan maupun pemberitaan media massa, kegiatan 2018 yang tersedia dalam media massa yakni kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Kemhan RI yang merupakan kegiatan mitra/undangan bukan terprogram. Kegiatan yang terlaksana sebelum pandemi 2016-2019 6 kegiatan terprogram dan 2 kegiatan non program dengan skor 2.9, saat setelah pandemi 2 kegiatan terprogram dan 3 kegiatan non program serta 2 rencana kegiatan di tahun 2022 dengan skor 2.5, akumulasi skor 3.0 dari 4.0

#### **3. Sub indikator 18 Tanggapan Kepuasan Pihak yang Dilayani**

Masyarakat antusias dan puas terhadap kegiatan yang ada, dan masyarakat meminta program pendidikan penguatan wawasan kebangsaan dilanjutkan sampai ke desa-desa. Tidak ada survey kepuasan pelayanan dari internal Bakesbangpol Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai nilai-nilai luhur bangsa sehingga terpanggil untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Skor 3.0 dari 4.0.

#### **4. Sub indikator 19 Penggunaan Waktu Kegiatan**

Pelaksanaan tugas sosialisasi pendidikan penguatan wawasan kebangsaan sesuai jam dinas, khusus bidang IV Intelijen dan Kewaspadaan Dini Masyarakat bekerja 24 jam memonior perkembangan masyarakat Kabupaten Belu. Skor 3.8 dari 4.0.

#### **5. Sub indikator 20 Biaya Pelaksanaan Program (Penyerapan)**

DPA Bidang I Tahun 2021 terserap 100%. Perkegiatan dianggarakan 20 juta saat masa pandemi, berasal dari DAU APBD Tahun 2021. Khusus point ini data yang didapatkan ialah 2021 sedangkan menurut hasil wawancara kegiatan terserap 100% sejak 2016-2021 dimana sudah diangarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran tahun berjalan, dimana jika penyerapan

anggaran tidak optimal maka alokasi dana tahun depan akan dikurangi dengan catatan OPD tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Skor 4.0 dari 4.0.

Demikian diperoleh Nilai dan Predikat efektivitas Komponen Produk yakni kepuasan pihak – pihak yang dilayani dan ketercapaian program pada PPWK yang dilaksanakan Bakesbangpol Kabupaten Belu yakni 3.36 dengan predikat Efektif. Nilai dan Predikat dari kumulatif 4 indikator dapat dilihat di Lampiran, Nilai Kumulatif 3.3 Predikat Efektif terhadap keseluruhan komponen yakni Konteks, Input, Proses dan Prosuk pada Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan oleh Bakesbangpol Kabupaten Belu.

Komponen Konteks merupakan komponen yang cenderung statis/tidak mengalami perubahan signifikan dari 2016-2022 sedangkan komponen Input (khususnya ketersedian dana), komponen Proses dan komponen Produk cenderung mengalami perubahan/dinamika dalam ketercapaian efektivitas dari 2016-2022. Penelitian ini menggunakan istilah Pendidikan Penguatan wawasan Kebangsaan sebagaimana disesuaikan dengan nomenklatur pelaksanaan yang berjalan di Kabupaten Belu, dengan istilah lain yang berjalan di kab/kota lain Pendidikan Wawasan Kebangsaan tidaklah ada perbedaan diantaranya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa kesimpulan

1. Sejarah Badan Kesbangpol pada masa Orde Baru bernama Kantor Sospol (Sosial Politik) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, nomenklatur berubah lagi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu berlaku hingga saat ini. Nilai dan Predikat efektivitas Komponen Konteks yakni tentang Profil Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu sebagai Lembaga Penganggungjawab Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan di daerah yakni 3.4 dengan predikat Sangat Efektif. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan tidak ada di Kabupaten Belu namun secara fungsional kegiatan PWK berjalan di Kabupaten Belu atas SK Bupati yang dikoordinir Bidang I Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kabupaten Belu, hal ini didukung dengan keselarasan Visi Misi lembaga, dan diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Belu 2016-2021, 2021-2026 sebagai Indikator Program pada Bakesbangpol Kabupaten Belu. Kegiatan menyasar masyarakat kecamatan perbatasan.
2. Nilai dan Predikat efektivitas Komponen Input indikator tata kelola Bakesbangpol Kabupaten Belu dalam program PPWK yakni 3.0 predikat Efektif. Dana pelaksanaan program terjadi penurunan anggaran pada masa pandemic covid-19 dan pada RPJMD 2021-2016. Sarana Prasarana baik dan memadai. Metode masih sebatas cermah dan diskusi, Evaluasi kegiatan program melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pimpinan. Nilai dan Predikat efektivitas Komponen Proses indikator pelaksanaan yakni 3.31 predikat Efektif. Pelaksanaan kegiatan cenderung tepat waktu dikarenakan adanya pemetaan wilayah, koordinasi dan sinkronisasi berjalan baik internal Bakesbangpol dan Kecamatan penerima layanan PWK. Materi wajib yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI ditambah materi fakultatif perkenalan organisasi dan tata kelola Bakesbangpol Kabupaten Belu, hambatan meliputi anggaran SDM, kepustakaan mengenai wasbang. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara yakni sosialisasi 4 konsensus nasional, sejak 2020 meluas kolaborasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan pada gerakan Belu Melayani, Belu Tertib, Belu Bersih dan Belu Bersatu.
3. Nilai dan Predikat efektivitas Komponen Produk yakni kepuasan pihak-pihak yang dilayani dan ketercapaian program pada PPWK yang dilaksanakan Bakesbangpol Kabupaten Belu yakni 3.36 dengan predikat Efektif. Kualitas cukup tercapai. Secara kuantitatif kegiatan terprogram 2016-2019 berjalan efektif kecuali 2018 dimana tidak ditemukan dokumen paloporan kegiatan. Kegiatan 2020 dan 2021 cukup efektif karena pandemic covid-19 penerapan 3M mengakibatkan dari segi sasaran yang sedikit dan berakibat juga anggaran kegiatan yang menurun. Tanggapan masyarakat antusias dan puas terhadap kegiatan yang ada, masyarakat meminta program pendidikan penguatan wawasan kebangsaan dilanjutkan sampai ke desa-desa. Tidak ada survey kepuasan pelayanan dari internal Bakesbangpol.

## Daftar Rujukan

- Adibakas, Mahesa Berry. (2018). *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cep Safruddin Abdul. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Aulia, Syifa Siti dan Arpannudin, Iqbal. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal*. Jurnal Civic Education; Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019); UniversitaS Negeri Manado.
- Batu, Stefani Ursula. (2022). *Dampak Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Kesiapan Mental Mahasiswa Semester V Kelas A Program Studi PPKn FKIP Undana*. Skripsi. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Bessie, Daniel Frans dan Lobo, Leonard. (2019). *Ilmu Kewarganegaraan*. Kupang: Dania Abadi Graphia.
- BPS Kabupaten Belu. (2021). *Kabupaten Belu dalam Angka 2021; Belu Regency in Figures 2021*. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
- Bria, Makarius Erwin. (2017). *Penguatan Wawasan Kebangsaan Peserta Didik di Daerah Perbatasan Indonesia – Timor Leste Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Prosiding Seminar Prodi PPKn FKIP UAD, PPS PPKn UNY. (Bani, 2021)
- Engkoswara dan Komariah, Aan. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV.
- Harnanto, Sugeng. (2016). *Evaluasi Program Pendidikan Karakter di SD Negeri Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Tesis. Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Kamil. Mustofa. (2011). *Pendidikan Non Formal Pengembangan Melalui Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia; Sebuah Pembelajaran dari Komunitas Jepang*. Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya
- Lemhanas dan Ditjen Perguruan Tinggi Depdikbud. (1988). *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia.
- Moenta, Andi Pangarang dan Pradana, Syafa'at Anugrah. (2018). *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Pimpinan dan Badan Sosialisasi MPR RI. (2016). *Panduan Pemasarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Puspasari, Sharfina Aulia. (2022). *Muatan Nilai Pendidikan Perdamaian Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 4 Semarang*. Skripsi. Prodi Teknologi Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Putra, Okven Pratama. (2020). *Evaluasi Program Pembelajaran Tematik Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Dan Product) di Sekolah Dasar Negeri Mangunsari 01 Gunungpati Semarang*. Skripsi. Prodi Teknologi Pembelajaran Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

- Sainab, Sitti. Suaib, Muh Ridha dan Purnomo, Arie. (2017). *Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas ) Kota Sorong*. Jurnal Faksi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3 No 4 (2018); LPPP Universitas Muhammadiyah Sorong
- Sanjaya, Wina. (2016). *Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarmanto, Eko dkk. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat; Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutrisno, Sapriya, Komalasarai, Rahmat. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan dalam Membangun Warga Negara Global*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2020: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung.
- Syah, Muhibbin. (2017). *Psikologi Belajar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Pokja Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara. (2016). *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*. Jakarta: Lemhanas RI.
- Tobing, Raida L. (2012). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2014). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin dan Budimansyah, Dasim. dkk. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press